

# **ISLAM DAN ILMU KEADABAN**

**50 Tahun Fakultas Adab dan Ilmu Budaya**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Fakultas Adab dan Ilmu Budaya**

**UIN Sunan Kalijaga**

**ISLAM DAN ILMU KEADABAN**  
**50 Tahun Fakultas Adab dan Ilmu Budaya**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Tim Penulis**

Lathiful Khuluq  
Syihabuddin Qalyubi  
Siti Maimunah  
Sujadi  
Himayatul Ittihadiyah  
Danial Hidayatullah  
Badrus Alaena  
Maharsi  
Dwi Margo Yuwono  
Nurdin Laugu  
Anis Masruri  
Labibah Zain  
Sri Rohyanti Zulaikha  
Tafrikhuddin  
Marwiyah

**Editor**

Lathiful Khuluq dkk.

ISBN - 10: 979-3494-58-1  
ISBN - 13: 978-979-3494-58-6

Cetakan Pertama, Oktober 2011

Diterbitkan oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta bekerjasama dengan Penerbit Belukar

**Fakultas Adab dan Ilmu Budaya**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281  
Telp.: 0274-513949, 552883

**Penerbit Belukar**

Jl. Wahid Hasyim gg. Menur No. 75  
Condongcatur Sleman Yogyakarta 55283  
Telp.: 0274-487032  
e-mail: bukubelukar@yahoo.com

## DAFTAR ISI

Pengantar Editor .....	iii
Sambutan Dekan.....	vii
Daftar Isi .....	ix

### BAB I PENDAHULUAN.....1

1. Layar Terkembang: Sosio-Histori Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga <i>Oleh Lathiful Khuluq</i> .....	2
2. Kontribusi Ilmu Al-Uslub (Stilistika) Dalam Pemahaman Komunikasi Politik <i>Oleh Syihabuddin Qalyubi</i> .....	8

### BAB II SEJARAH SEBAGAI USWAH HASANAH .....27

3. Biografi K.H. Mas Mansur (1896-1946) <i>Oleh Siti Maimunah</i> .....	28
4. Biografi Sosial-Politik K.H.A. Wahid Hasyim: Guru Bangsa yang Bersahaja <i>Oleh Lathiful Khuluq</i> .....	41
5. PPME and Others Non-Indonesian In Then Netherlands: Endeavours for Goal-Directed Networks <i>Oleh Sujadi</i> .....	60
6. Menelusuri Jejak Kesadaran Intelektualisme Umat Islam Indonesia <i>Oleh Himayatul Ittihadiyah</i> .....	87

### BAB III ILMU BUDAYA DAN APLIKASINYA.....107

7. Sastra Inggris dan Perannya dalam Ilmu Budaya <i>Oleh Danial Hidayatullah</i> .....	108
8. Budaya dan Penyadaran Konservasi Lingkungan Menuju Pembangunan Kehidupan <i>Oleh Badrun Alaena</i> .....	132
9. Wanita dalam Kebudayaan Jawa, Antara Harmoni dan Kesetaraan Gender <i>Oleh Maharsi</i> .....	149
10. Terjemahan Dari Masa ke Masa <i>Oleh Dwi Margo Yuwono</i> .....	164

<b>BAB IV PERPUSTAKAAN ISLAM MENUJU MASA DEPAN.....</b>	<b>177</b>
11. Sejarah Perpustakaan Islam di Spanyol: Sebuah Kajian Deskriptif <i>Oleh Nurdin Laugu .....</i>	178
12. Asal-Usul Skema Dewey Decimal Classification: Sebuah Perdebatan <i>Oleh Anis Masruri .....</i>	210
13. Teknologi Informasi dan Penerapannya ke dalam Kurikulum Pendidikan Perpustakaan dan Informasi: Sebuah Tawaran <i>Oleh Labibah Zain.....</i>	229
14. Menjadi Profesional di Bidang Informasi: Menghadapi Fenomena Demokratisasi dan Konvergensi Teknologi <i>Oleh Putu Laxman Pendidit, Labibah Zain dan Imas Maesaroh .....</i>	237
15. Pengembangan Keilmuan Perpustakaan dan Informasi Terkait dengan Aspek Kultural Kepustakawan di Era Library 2.0 <i>Oleh Sri Rohyanti Zulaikha .....</i>	259
16. Sertifikasi Guru Pustakawan: Alternatif Pengembangan Profesi untuk Peningkatan Kualitas Perpustakaan Sekolah/Madrasah <i>Oleh Tafrikhuddin .....</i>	271
17. Peran Perpustakaan dalam Memerikan Layanan Kepada Masyarakat Difabel dalam Mengakses Pendidikan di Perguruan Tinggi <i>Oleh Marwiyah.....</i>	289
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>307</b>
18. Kunci Sukses Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga <i>Oleh Lathiful Khuluq .....</i>	308

## **BUDAYA DAN PENYADARAN KONSERVASI LINGKUNGAN: MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

**Oleh: Badrun Alaena**

(Dosen Fakultas Adab dan Ilmu Budaya,  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

### **A. Pengantar**

Pembicaraan tentang lingkungan hidup akhir-akhir ini semakin menarik perhatian masyarakat luas. Berawal dari sebuah realitas bahwa kondisi lingkungan yang detik ini tidak bisa dipungkiri mengalami krisis berkepanjangan dengan menimbulkan berbagai dampak baik secara ekonomi, sosial, dan ekologi. Bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, merupakan dampak yang harus diterima masyarakat akibat konsekuensi logis dari proses eksploitasi terhadap sumber daya alam, yang lebih mencirikan dominasi kekuasaan manusia terhadap alam.

Manusia sebagai pengguna sumber daya alam terbesar tentunya harus mulai sadar untuk bisa lebih arif menyikapi hal ini. Kesadaran sebagai kunci utama dalam membentuk pola pikir masyarakat secara massal merupakan sebuah langkah yang membutuhkan proses dan bahkan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Kesengajaan sebagian masyarakat membakar hutan sehingga menimbulkan pencemaran dan terhitung sebagai agenda tahunan mengindikasikan kesadaran masyarakat yang belum melek. Terlepas hal ini menjadi tanggung jawab berbagai pihak terutama para pengambil kebijakan, posisi sosial masyarakat tidak akan bisa dihindari.

Penekanan dari berbagai masalah tersebut adalah dari pema-haman dan pengetahuan yang akan menumbuhkan sebuah kesadaran baik secara individu maupun kolektif. Bagaimana kesadaran itu kemudian bisa terwujud jika memang tidak pernah ada suatu pemahaman yang komprehensif tentang pengelolaan yang tepat terhadap lingkungan.

Pengetahuan dan pemahaman yang utuh melalui proses edukasi yang dilakukan sebagai bentuk penyadaran harus dianggap sebagai hal yang positif demi kelangsungan kehidupan secara keseluruhan, mengingat pendidikan adalah sebagai salah satu kegiatan *transfer of knowledge*. Meminjam istilah Emil Salim, bahwa kita hidup di sebuah perahu yang sama yang bernama "Bumi". Oleh karena secara kepemilikan adalah bersama, maka tanggung jawab juga merupakan tanggung jawab bersama, yang bisa dibentuk menjadi karakter bersama melalui proses dialektika pendidikan lingkungan hidup.

### **B. Permasalahan Lingkungan**

Disadari atau tidak negara dan dunia sedang mengalami krisis lingkungan yang berkepanjangan. Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No 23/1997 menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, dan dunia secara global sedang mengalami hal tersebut. Disharmoni terjadi antara pengguna jasa (manusia) dengan alam sebagai penyedia jasa. Fakta fenonemal melandanya bencana banjir di Jakarta adalah implikasi dari penggunaan jasa alam yang tidak berkelanjutan. Bencana banjir yang terjadi hampir tiap tahun bukanlah fenomena tanpa sebab, setiap musim hujan tiba limpahan air akan meningkat ditambah dengan curah hujan yang cukup tinggi ditambah faktor tidak lancarnya arus sungai sehingga terjadi banjir yang berkepanjangan. Noor (2005:65) menjelaskan proses tersebut terjadi karena siklus hidrologi (siklus air) yang tidak stabil yang salah satunya juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Penataan kota yang tidak mempertimbangkan kedaan lingkungan hidup serta diperparah dengan carut marutnya sistem pengelolaan lingkungan hidup karena tidak diberlakukannya aturan yang jelas dan tegas oleh semua pihak. Akhirnya tidak bisa dipungkiri lagi fenomena bencana alam terjadi akibat dari pengelolaan dan eksplorasi yang tidak berwawasan ekologi dan berkelanjutan.

Globalisasi sebagai imbas perkembangan zaman adalah suatu hal yang dinilai positif sebagai kemajuan akan pola pikir manusia namun juga merupakan ancaman terhadap kehidupan manusia. Salah satu pengaruh positif dari globalisasi adalah dengan penyebaran teknologi, namun disisi lain permasalahan lingkungan juga terjadi. Dampak

globalisasi diakibatkan dari semakin berkembangnya industrialisasi di seluruh dunia sehingga menyebabkan terjadinya efek rumah kaca (ERK). Efek rumah kaca menyebabkan pemanasan global yang muncul akibat polusi dan pencemaran baik air, udara dan tanah. Semua itu juga berkaitan pula dengan problem regulasi dan kemiskinan masyarakat akibat tidak ada *master plan* pembangunan berkelanjutan, program kerja yang jelas dan inkonsistensial, serta tidak adanya ketegasan hukum yang jelas dan proses-proses yang merugikan berkenaan dengan pemberdayaan pembangunan lingkungan.

Akhirnya, titik tekan permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup pada dasarnya adalah bertumpu pada manusia, yang secara ekologi merupakan makhluk hidup yang dominan dalam sebuah ekosistem. Soemarwoto (2004:9) juga mencoba menyimpulkan hal ini, bahwa faktor yang sangat penting dalam permasalahan lingkungan ialah besarnya populasi manusia. Dengan pertumbuhan populasi manusia yang cepat, kebutuhan akan pangan, bahan bakar, tempat pemukiman dan kebutuhan-kebutuhan lainnya serta limbah domestik juga bertambah dengan cepat. Pertumbuhan populasi ini telah mengakibatkan perubahan besar dalam lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan sangat erat kaitannya dengan proses pembangunan, sehingga pembangunan dan pembinaan lingkungan adalah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Pembangunan sebagai upaya peningkatan kehidupan manusia membutuhkan sebuah pasokan sumber daya yang bisa menyebabkan masalah lingkungan dengan berkurangnya bahkan meniadakan sumber daya alam. Hal yang menjadi masalah adalah bukanlah mempertanyakan membangun atau tidak membangun, akan tetapi bagaimanakah membangun yang sehingga menaikkan kualitas lingkungan yang terdukung dan berkelanjutan. Hal ini menurut Sugandhi (2007 :21) disebut dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

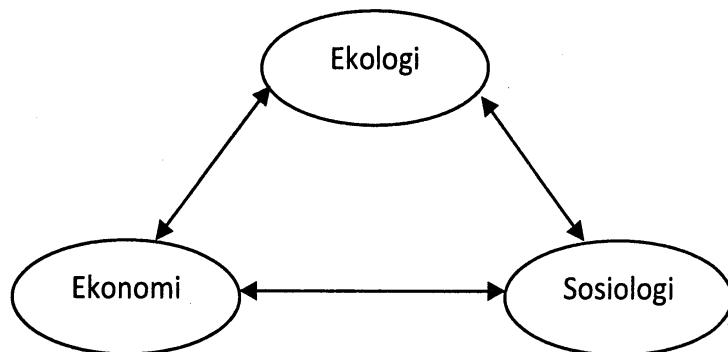
### C. Pola Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini, tanpa mengurangi potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia masa mendatang (*Our Common Future*). Sembilan belas tahun lalu, April 1987, World Commission on Environment and Development (WCED, Komisi Sedunia Lingkungan Hidup dan Pembangunan)

menyelesaikan tugasnya menyusun konsep pembangunan berkelanjutan (Mangunjaya, 2006:33). Dunia yang saat itu sedang dirundung kemelut lingkungan, segera menyambut konsep baru ini dengan penuh harapan.

Berbicara lingkungan hidup tanpa bicara aspek ekonomi dan hukumnya, membuat fungsi lingkungan hidup tidak akan berjalan. Maka muncullah konsep yang dikenal dengan *sustainable development*. Pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan 3 aspek:

- Ekonomi (memacu pertumbuhan ekonomi),
- Sosial (kemaslahatan orang banyak, memberdayakan yang tidak berdaya),
- Ekologi (melindungi ekosistem).



Tabel 1. Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah lingkungan hidup di mana lingkungan alami, pembangunan ekonomi, dan kehidupan sosial, dianggap saling berkaitan, dan hubungan di antaranya menyebabkan peningkatan kualitas hidup dan sifat berkelanjutan masyarakat dan lingkungan hidup.

Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup adalah suatu hal yang rentan, sehingga harus ekstra hati-hati terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya hasil tambang. Sudah saatnya pembangunan mengacu ke paradigma pembangunan berkelanjutan. Sayangnya, ide besar itu sedikit banyak dilupakan dan diabaikan dalam hiruk-pikuk pembangunan daerah. Suatu kesalahan besar yang kemudian kita bayar dengan sangat mahal sekarang ini adalah kita menekankan pada pembangunan ekonomi semata, khususnya pertumbuhan ekonomi, dan melalaikan ekologi/konservasi, serta aspek

sosial budaya. Setelah semua sumber daya alam dieksplorasi habis-habisan, sekarang kita membayar dengan konsekuensi yang mahal, yaitu keadaan lingkungan yang rusak.

Di sisi lain, ada yang harus dibayar mahal ketika sosial budaya tidak mendapatkan tempat dalam sebuah ide besar pembangunan, yaitu lingkungan akan hancur. Jika dikalkulasi secara ekonomi, nilai kehancuran lingkungan tersebut jauh lebih mahal. Bukan lagi peningkatan ekonomi masyarakat yang terjadi, namun justru sebaliknya, meskipun dampak tersebut akan dirasakan dalam jangka panjang.

Permasalahan lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dari persoalan kemiskinan dan pola konsumsi masyarakat. Contohnya dibeberapa negara miskin, kerusakan lingkungan disebabkan oleh kemiskinan, sehingga mengatasi permasalahan lingkungan hidup adalah mengatasi permasalahan kemiskinan. Masyarakat yang hidupnya tergantung pada sumberdaya hutan itu miskin sementara yang kaya adalah pengusaha yang memiliki hak pemanfaatan hutan (pengusaha HPH). Hal ini mencerminkan tidak terjadi keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam dengan konstruk sosial masyarakat, akibatnya ada pihak yang mengambil secara paksa produk alam demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Disadari atau tidak, kehidupan manusia sangat bergantung kepada alam. Sebagai rasa terima kasih terhadap alam yang mampu dan mau menyediakan bahan kehidupan dalam sumber daya alam, pemanfaatan secara benar harus dilakukan. Belum banyak yang memahami bahwa keanekaragaman hayati sebagai produk dari alam mempunyai nilai yang sangat penting bagi kesejahteraan manusia. Indonesia merupakan salah satu dari tujuh negara yang memegang kekayaan terbesar keanekaragaman hayati (*mega biodiversity*). Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati nomor dua setelah Brazil. Potensi akan menjadi sorotan akan pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati seba-gai sumber kekayaan genetik untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu keanekaragaman hayati yang ada secara ekonomi merupakan aset yang sangat besar.

Mangunjaya (2006:11) menjelaskan mengapa keanekaragaman hayati memiliki prospek penting dari segi ekonomi. *Pertama*, keanekaragaman hayati adalah sumber potensial kekayaan genetik dengan berbagai variasi memiliki nilai yang besar bagi ketersediaan gen

cadangan makanan. *Kedua*, keanekaragaman hayati di hutan merupakan satu-satunya harapan hidup manusia karena disanalah gudang obat-obatan untuk penyembuhan penyakit. *Ketiga*, memiliki keanekaragaman hayati berarti memiliki pilihan yang besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Keempat*, memiliki keanekaragaman hayati berarti memiliki kekayaan jenis yang bervariasi yang bisa dimanfaatkan untuk wisata alam (*ecotourist*).

Akhirnya proses pembangunan sangatlah ditentukan oleh keberadaan baik secara kuantitas maupun kualitas dari sumber daya alam yang ada. Pembangunan sendiri dimaknai sebagai upaya sadar untuk mengelola serta memanfaatkan sumberdaya guna meningkatkan mutu kehidupan masyarakat secara utuh. Keberhasilan pembangunan ekonomi sampai saat ini masih dijadikan tolak ukur dari kualitas hidup manusia, sehingga semakin tinggi tingkat ekonomi semakin tinggi pula tingkat kualitas hidup manusia. Namun semakin tinggi tingkat ekonomi berarti semakin tinggi pula tingkat kebutuhan dan semakin tinggi pula sumber daya yang diperlukan. Pertumbuhan ekonomi yang terus menerus berlangsung akhirnya memaksa sumber daya alam untuk selalu menyediakan jasa tanpa ada toleransi kemampuan akan alam itu sendiri.

Apa sebenarnya permasalahannya dan apa yang kemudian harus dilakukan? Persoalannya kemudian adalah bahwa tiap individu di dalam masyarakat yang tidak memperdulikan alam disebabkan karena minimnya pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan lingkungan hidup. Kesadaran kolektif mutlak diperlukan yang kesemua itu akan dibarengi pula dengan kesadaran individu di dalam masyarakat. Perlu dilakukan sebuah proses berkesinambungan yang akan sangat efektif jika dilakukan dengan media pendidikan, melalui setiap jenjang pendidikan yang ada. Konsep pembangunan berkelanjutan adalah konsep tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan, sehingga dalam mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan, salah satu aplikasinya diperlukan pendidikan tentang lingkungan hidup.

## D. Karakteristik Pendidikan Lingkungan Hidup

### a. Pengertian dan Definisi

Pendidikan secara umum mempunyai pengertian sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak manusia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Seperti dalam Pidarta (Pidarta, 2002) juga dijelaskan bahwa kegiatan pendidikan bermaksud untuk membuat manusia menjadi lebih sempurna, membuat manusia meningkatkan hidupnya dari kehidupan alamiah menjadi berbudaya, sehingga proses pendidikan adalah proses membudayakan manusia. Budaya yang terbentuk akan membentuk karakter dan watak bangsa untuk mewujudkan bangsa yang bermartabat.

Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dimaknai sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidup-an dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jelas tergambar bahwa berbicara lingkungan hidup berarti membicarakan segala komponen kehidupan dimana satu dengan lainnya merupakan sebuah sistem. Semua komponen merupakan sebuah kesatuan yang utuh yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

“Pendidikan Lingkungan Hidup” berarti “pendekatan proses pelajaran yang membantu individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk memahami konsep pembangunan berkelanjutan”. Pendekatan tersebut harus meliputi semua aspek kurikulum pendidikan. Tujuan pengertian mengenai pembangunan berkelanjutan adalah supaya “kalangan muda mengembangkan sikap kepedulian dan berkomitmen, dan mempunyai keinginan untuk bertanggungjawab pada lingkungan hidup dan terhadap orang lain”.

Batasan Pendidikan Lingkungan Hidup memang hingga sekarang masih menjadi perdebatan dalam berbagai kesempatan. Di Indonesia memang belum ada kesepakatan tentang apa yang dimaksud pendidikan lingkungan hidup. Batasan Pendidikan Lingkungan hidup yang banyak diacu sampai saat ini masih merujuk pada batasan yang dihasilkan dalam Konfensi UNESCO di Tbilisi tahun 1977 (Sugandhi, 2007 : 40). Pendidikan lingkungan dimaknai sebagai suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat dunia yang memiliki kepedulian

terhadap lingkungan dan masalah-masalah yang terkait didalamnya, serta memiliki pengetahuan, motivasi, komitmen, dan ketrampilan untuk bekerja - baik secara perorangan maupun kolektif dalam mencari atau memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan yang ada sekarang dan untuk menghindari timbulnya masalah-masalah lingkungan baru.

Secara sederhana bisa disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang peduli lingkungan dan kecakapan untuk memberi penyelesaian masalah lingkungan dapat disebut sebagai pendidikan lingkungan. Namun yang paling mendasar adalah bahwa pendidikan lingkungan hidup ini mempunyai tujuan untuk merubah perilaku, dimana dalam hal ini berarti khalayak sebagai sasaran (termasuk anak, dan peserta didik) tidak sekedar diberi informasi dalam proses belajar mengajar. Proses yang kemudian dilakukan adalah untuk mengembang-kan kesadaran, pengetahuan, sikap, ketrampilan dan partisipasi setiap elemen masyarakat yang dianggap sebagai stakeholder utama pengendali lingkungan.

#### **b. Perkembangan Pendidikan Lingkungan Hidup**

Perkembangan pendidikan lingkungan hidup berawal dari sebuah lokakarya internasional tentang Pendidikan Lingkungan Hidup di Beograd Jugoslavia tahun 1957 yang menghasilkan pernyataan antar negara peserta mengenai pendidikan lingkungan hidup, dimana muncul sebuah komitmen untuk melakukan sebuah penyadaran terhadap keterkaitan bidang ekonomi, sosial, politik serta ekologi sehingga akhirnya akan tercipta satu kesatuan pola tingkah laku masyarakat terhadap lingkungan hidup.

IKIP Jakarta pada tahun 1975 mengawali perkembangan penyelenggaraan pendidikan lingkungan dengan menyusun garis-garis Besar Program Pengajaran Pendidikan Lingkungan Hidup yang diujicobakan di 15 Sekolah Dasar di Jakarta pada periode tahun 1997/1998 dan mulai dibentuk dan berkembang Pusat Studi Lingkungan (PSL) di berbagai Perguruan Tinggi pada tahun 1979. Tahap selanjutnya pada tahun 1983 – 1993 kegiatan pendidikan lingkungan hidup mulai berkembang baik pada jalur formal maupun non formal. Jalur formal dila-kukan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dengan materi pendidikan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan konservasi SDA

diintegrasikan dalam Kurikulum 1984. Sejak tahun 1993 sampai sekarang bisa dikatakan proses kegiatan pendidikan lingkungan hidup masuk pada tahap pemantapan dan pengembangan, hal ini dudukung dengan ditetapkannya Memorandum Bersama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan kantor menteri Negara Lingkungan Hidup No. 0142/U/1996 dan No Kep: 89/MENLH/5/1996 tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup, tanggal 21 Mei 1996.

Berbagai upaya terus dilakukan sebagai bentuk komitmen Bangsa dalam konteks pengupayaan pelestarian hidup, dan nampaknya peran pendidikan dalam hal ini dirasa sangat signifikan terhadap peningkatan mutu kualitas lingkungan hidup. Sebagai bentuk komitmen akan hal tersebut juga telah terjadi kesepakatan Bersama antara menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional No KEP 07/MENLH/06/2005 No:05/VI/KB/2005 tentang “Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup” yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama diantara kedua belah pihak dalam menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai wawasan lingkungan hidup kepada peserta didik dan masyarakat serta meningkat-kan sumber daya manusia sebagai pelaksana pembangunan pelestarian lingkungan hidup ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

### **c. Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup**

Pendidikan lingkungan hidup sebagai upaya dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tentunya akan menjadi pioner untuk menentukan masa depan bangsa. WCED (*World Commission on Environment and Development*) pencetus gagasan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan), dalam merumuskan wawasan lingkungan dalam pembangunan pun dengan melakukan pendekatan di berbagai aspek salah satunya adalah aspek pendidikan. Saifullah (2007 : 26), menjelaskan bahwa perlu ada sebuah reorientasi ulang perihal paradigma yang selama ini dianut masyarakat terhadap lingkungan hidup dan pembangunan, dan reorientasi ini salah satunya dapat dimulai dengan mengadakan kajian tentang perlunya pengubahan paradigma pola pikir terhadap lingkungan hidup. Tentunya perubahan paradigma pola pikir ini akan efektif jika dilakukan dengan proses pendidikan yang berkesinambungan.

Pada dasarnya tujuan pendidikan lingkungan hidup adalah penciptaan lingkungan yang berkelanjutan, dimana masyarakat dapat hidup dan bekerja tidak hanya untuk generasi sekarang namun juga untuk generasi masa depan. Kiranya efektifitas transfer ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan sampai detik ini dirasa cukup efektif sebagai pembentukan pola pikir generasi yang akan datang. Tidak bisa dipungkiri tingkat kecerdasan masyarakat sedikit banyak dapat dikembangkan melalui berbagai pendidikan di lembaga pendidikan (sekolah). Hasbullah (2006:103) mencoba menjelaskan dalam hal pengaruh lembaga pendidikan (sekolah) terhadap masyarakat pada dasarnya tergantung kepada luas tidaknya produk serta kualitas *out put* pendidikan itu sendiri. Semakin besar *out put* yang disertai dengan kualitas yang mantap, yaitu mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas tentu pengaruhnya sangat positif bagi perkembangan masyarakat.

Setiap manusia mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup baik hak atas informasi maupun hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup, begitu pula setiap manusia berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup no 23/1997. Pada akhirnya, setiap masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan aktifitas peran tersebut tentunya dapat dilakukan dengan berbagai cara yang pada intinya meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Langkah tersebut akan efektif dilakukan dalam sebuah proses edukasi, yaitu dalam bentuk pendidikan lingkungan hidup.

Visi dari pendidikan lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk mewujudkan manusia Indonesia yang memiliki pengetahuan, kesadaran, dan ketrampilan untuk berperan aktif dalam melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pada hakikatnya visi ini bertitik tolak dari latar belakang permasalahan pendidikan lingkungan hidup yang ada selama ini dan sejalan dengan filosofi pembangunan berkelanjutan.

Hal-hal yang kemudian menjadi penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup ini adalah:

1. Unsur materi yang berbasis kearifan tradisional dan isu lokal, modern serta global yang kemudian diintegrasikan ke dalam kurikulum terutama dalam lembaga pendidikan formal. Hal ini dikarenakan permasalahan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan situasi sosial budaya masyarakat sekitar tempat tinggal.
2. Metode pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup menjadi hal lain yang sangat penting dan sangat berperan dalam menghasilkan proses yang berkualitas. Pengembangan metode pelaksanaan pendidikan berbasis kompetensi dan partisipatif, sehingga memunculkan proses pembelajaran yang mendukung pengembangan daya nalar dan kreativitas. Hal ini terkait dengan masalah-masalah lingkungan hidup yang perlu dipecahkan tidak hanya secara teknis, namun yang lebih penting adalah pemecahan yang dapat mengubah kesadaran akan perubahan lingkungan hidup, sehingga membentuk pendidikan terpoli. Pendidikan yang terpoli adalah memiliki isi yang humanistik dan berwawasan lingkungan.
3. Konsep-konsep yang penting di bidang pendidikan lingkungan hidup termasuk di dalamnya adalah mengenai sumber-sumber alam yang tidak dapat diperbaiki, sumber alam yang dapat diperbarui, dan sistem lingkungan hidup yang terdiri dari empat bagian (politik, sosial, ekonomi, dan biofisika). Konsep ini merupakan turunan sederhana dari konsep Pembangunan Berkelanjutan, karena berbicara lingkungan hidup berarti berbicara tentang sosial, ekonomi masyarakat dimana juga terkait dengan segala bentuk kebijakan yang ada yang semua itu tergantung juga pada bumi sebagai suatu sistem kehidupan. Zen (1982:3) menjelaskan hubungan ini sebagai interaksi atau hubungan kait mengait, dimana sistem yang sebenarnya adalah "tertutup", yaitu bergerak di satu lingkaran.
4. Pendidikan Lingkungan Hidup memasukkan aspek afektif yaitu tingkah laku, nilai dan komitmen yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan (*sustainable*). Pencapaian tujuan afektif ini biasanya sukar dilakukan. Oleh karena itu, dalam pembelajaran perlu dimasukkan metode-metode yang memungkinkan berlangsungnya klarifikasi dan internalisasi nilai-nilai. Pendidikan lingkungan hidup perlu

menjelaskan bahwa dalam kehidupan nyata selalu terdapat perbedaan nilai-nilai yang dianut oleh individu. Perbedaan nilai tersebut dapat mempersulit untuk *derive the fact*, serta dapat menimbulkan kontroversi/perten-tangan pendapat. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan hidup perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun ketrampilan yang dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah.

Untuk itu, mengacu pada penjabaran Keraf (2002 : 144) ada beberapa prinsip etika dalam lingkungan hidup, yang nantinya lebih jauh barangkali prinsip-prinsip tersebut bisa di-jadikan acuan dasar dalam perumusan dan pelaksanaan pen-didikan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Sikap hormat terhadap alam (*respect for nature*)

Bahwa alam mempunyai hak untuk dihormati, tidak saja karena kehidupan manusia bergantung pada alam, tetapi terutama karena kenyataan bahwa manusia merupakan bagian integral dari alam. Maka, sebagai perwujudan nyata dari penghargaan itu, manusia perlu memelihara, merawat, menjaga, melindungi, dan melestarikan alam beserta seluruh isinya.

2. Prinsip tanggung jawab (*moral responsibility for nature*)

Tanggung jawab tidak bersifat individual saja melainkan juga kolektif, sehingga setiap orang dituntut dan terpanggil untuk bertanggungjawab memelihara lingkungan sebagai milik bersama dengan rasa memiliki yang tinggi seakan merupakan milik pribadinya.

3. Solidaritas kosmis (*Cosmic solidarity*)

Solidaritas kosmik ini mendorong manusia mengambil sikap dan kebijakan yang pro-alam, pro-lingkungan, atau menentang setiap tindakan yang merusak lingkungan.

4. Prinsip Kasih sayang dan kepedulian alam (*caring for nature*)

Sebagai sesama anggota komunitas ekologis yang setara, manusia digugah untuk mencintai, menyayangi dan peduli kepada alam dan seluruh isinya tanpa diskriminasi tanpa dominasi.

5. Prinsip “*No Harm*”

Karena manusia mempunyai tanggung jawab dan kewajiban moral terhadap alam, maka manusia tidak akan mau merugikan alam. Contoh tanggung jawab dan kewajiban moral terhadap alam adalah dengan tidak menyakiti binatang, tidak menyebabkan musnahnya spesies tertentu, tidak menyebabkan matinya ikan di laut dan di sungai, tidak menyebabkan keanekaragaman hayati di hutan terbakar, tidak membuang sampah/limbah sembarangan, dan sebagainya.

6. Prinsip Hidup sederhana dan selaras dengan alam

Prinsip ini menekankan nilai, kualitas, cara hidup yang baik, dan bukan kekayaan, sarana, standar material. Prinsip ini lebih menekankan pada mutu kehidupan yang baik.

7. Prinsip keadilan

Prinsip ini terkait dengan bagaimana manusia harus berperilaku satu terhadap yang lain dalam kaitan alam semesta. Selain itu terkait dengan adanya akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya alam.

Selanjutnya, pendidikan lingkungan hidup haruslah:

1. Mempertimbangkan lingkungan sebagai suatu totalitas alami dan buatan, bersifat teknologi dan sosial (ekonomi, politik, kultural, historis, moral, estetika);
2. Merupakan suatu proses yang berjalan secara terus menerus dan sepanjang hidup, dimulai pada jaman pra sekolah, dan berlanjut ke tahap pendidikan formal maupun non formal;
3. Mempunyai pendekatan yang sifatnya interdisipliner, dengan menarik/mengambil isi atau ciri spesifik dari masing-masing disiplin ilmu sehingga memungkinkan suatu pendekatan yang holistik dan perspektif yang seimbang.
4. Meneliti (*examine*) isu lingkungan yang utama dari sudut pandang lokal, nasional, regional dan internasional, se-hingga siswa dapat memahami lebih mendalam menge-nai kondisi lingkungan di wilayah geografis yang lain;

5. Memberi tekanan pada situasi lingkungan saat ini dan situasi lingkungan yang potensial, dengan memasukkan pertimbangan perspektif historisnya;
6. Mempromosikan nilai dan pentingnya kerjasama lokal, nasional dan internasional untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah lingkungan;
7. Secara eksplisit mempertimbangkan/memperhitungkan aspek lingkungan dalam rencana pembangunan dan pertumbuhan;
8. Memampukan peserta didik untuk mempunyai peran dalam merencanakan pengalaman belajar mereka, dan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan dan menerima konsekuensi dari keputusan tersebut;
9. Menghubungkan (*relate*) kepekaan kepada lingkungan, pengetahuan, ketrampilan untuk memecahkan masalah dan klarifikasi nilai pada setiap tahap umur. Namun bagi umur muda (tahun-tahun pertama) diberikan tekanan yang khusus terhadap kepekaan lingkungan terhadap lingkungan tempat mereka hidup;
10. Membantu peserta didik untuk menemukan (*discover*) gejala-gejala dan penyebab dari masalah lingkungan;
11. Memberi tekanan mengenai kompleksitas masalah lingkungan, sehingga diperlukan kemampuan untuk berfikir secara kritis dengan ketrampilan untuk memecahkan masalah.
12. Memanfaatkan beraneka ragam situasi pembelajaran (*learning environment*) dan berbagai pendekatan dalam pembelajaran mengenai dan dari lingkungan dengan tekanan yang kuat pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktis dan memberikan pengalaman secara langsung (*first - hand experience*).

Kiranya konsep dasar mengenai lingkungan hidup khususnya sebagai bekal pelaksanaan dalam proses pendidikan berkelanjutan sudah menjadi bagian kajian yang banyak dilontarkan dalam setiap diskusi dan pembahasan. Namun perlu ada langkah bijak sebagai bentuk riil pelaksanaan yang tersistem menjadi sebuah kebijakan yang pada akhirnya bisa dilakukan secara kolektif. Berbagai kebijakan yang terkait dengan lingkungan hidup sudah mulai dirumuskan. Dalam usaha pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup dalam hal ini Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup

telah berupaya menetapkan dan mengembangkan materi Pendidikan Lingkungan Hidup, melakukan kerja sama dalam pelaksanaannya, menyiapkan substansi bahan ajar, serta melatih para guru dan tenaga kependidikan mengenai lingkungan. Bahan dasar pendidikan lingkungan hidup disiapkan oleh Deputi Bidang Kebijakan dan Kelembagaan Menneg-Lingkungan Hidup dan ditindaklanjuti secara teknis oleh Depdiknas. Hal ini dilakukan karena materi Pendidikan Lingkungan Hidup itu tidak berdiri sendiri tetapi terintegrasi dalam kurikulum yang sudah ada.

Persoalan lingkungan hidup merupakan persoalan yang bersifat sistemik, kompleks, serta memiliki cakupan yang luas. Oleh sebab itu, materi atau isu yang diangkat dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan lingkungan hidup juga sangat beragam. Seperti sudah dijelaskan diawal bahwa ada 3 (tiga) pilar Pembangunan Berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga pilar tersebut merupakan satu kesatuan yang bersifat saling ketergantungan dan saling memperkuat. Adapun materi dan isu yang bias dijabarkan dari masing-masing pilar tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pilar Ekonomi, Isu atau materi yang berkaitan adalah: Pola konsumsi dan produksi, Teknologi bersih, Pendanaan/pembiayaan, Kemitraan usaha, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pertambangan, Industri, dan Perdagangan
2. Pilar Sosial, Isu atau materi yang berkaitan adalah: Kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan, Kearifan/budaya lokal, Masyarakat pedesaan, Masyarakat perkotaan, Masyarakat terasing/terpencil, Kepemerintahan/kelembagaan yang baik, dan Hukum dan pengawasan
3. Pilar Lingkungan, Isu atau materi yang berkaitan adalah: Pengelolaan sumberdaya air, Pengelolaan sumberdaya lahan, Pengelolaan sumberdaya udara, Pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir, Energi dan sumberdaya mineral, Konservasi satwa/tumbuhan langka, Keanekaragaman hayati, dan Penataan ruang

## **E. Kesimpulan**

Lingkungan hidup adalah sebuah rangkaian sistem kehidupan yang terintegrasi ke dalam berbagai model dan fenomena kehidupan.

Setidaknya perbedaan peran setiap komponen yang ada dalam lingkungan merupakan sebuah sifat alamiah yang tidak bias dibedakan peran dan fungsinya. Manusia sebagai salah satu komponen dalam lingkungan dengan kemampuannya mengeksplotasi alam tentunya juga harus dibarengi dengan kemampuan untuk mengelola dan melestarikan lingkungan. Akan tetapi ini diperlukan sebuah proses penyadaran mengingat belum banyak yang mempunyai kemampuan akan hal tersebut. Pendidikan yang berwawasan lingkungan sebagai langkah untuk mendukung program pembangunan Berkelanjutan kiranya menjadi langkah strategis sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang sadar lingkungan. Oleh karena itu diperlukan sebuah format baku yang bisa dipakai sebagai acuan bagi setiap pengelola pendidikan khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan yang lebih penting bahwa bagaiman format tersebut akhirnya menyeret pada bentuk tanggung secara kolektif, yaitu bahwa persoalan lingkungan hidup adalah menjadi tanggung jawab bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bunga Rampai Perundangan Lingkungan Hidup.* 2005. Yogyakarta : Pustaka Widyatama.
- Hasbullah. 1997. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Keraf, A. Sony. 2002. *Etika Lingkungan.* Jakarta : Buku Kompas.
- Mangunjaya, Fachruddin M., 2006. *Hidup Harmonis dengan Alam.* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Noor, Djauhari. 2005. *Geologi Lingkungan.* Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Pidarta, Made. 2002. *Landasan Kependidikan : Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia.* Jakarta : Rineka Cipta.
- Saifullah. 2007. Hukum Lingkungan : Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman hayati. Malang : UIN Malang Press.
- Sugandhy, dkk. 2007. Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Zen, M.T. 1982. *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup.* Jakarta : PT Gramedia.
- [www.Kompas.com](http://www.Kompas.com)